



Dana Stimulan RT/RW Bukan untuk Honor Pengurus

YOGYA (MERAPI)- Dana stimulan dan administrasi untuk RT/RW masih sering disalahartikan peruntukannya, yaitu honor bagi pengurus RT/RW. Padahal dana yang dianggarkan Pemkot Yogyakarta tiap tahun melalui APBD tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugas RT/RW dalam administrasi.

Kepala Sub Bagian Bina Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Polana Setiyahati, Rabu (14/1) menjelaskan, pihak Sekda telah memberikan surat edaran pada 10 Januari kepada lurah yang menyatakan dana administrasi dan stimulan RT/RW bukan untuk honor. "Banyak yang masih mengira dana tersebut untuk honor, padahal bukan demikian," tegasnya.

Peruntukan dana administrasi misalnya, untuk keperluan fotokopi, pembelian alat tulis kantor. Sedangkan dana stimulan sifatnya digunakan untuk pengadaan barang keperluan sekretariat kantor RT/RW atau kegiatan penghijauan dan kebersihan lingkungan. "Proses pengajuan hingga pencairan dana tersebut berada di masing-masing kecamatan," lanjut Polana.

Dana administrasi masing-masing RW yang akan diterimakan sebesar Rp 700 ribu per tahun, sedang untuk RT sebesar Rp 500 ribu per tahun yang diberikan tiap semester dengan besaran masing-masing Rp 350 ribu untuk RW dan Rp 250 ribu untuk RT. RT di Kota Yogyakarta berjumlah 2.523 sedang RW sebanyak 614.

Diutarakan, dana stimulan untuk masing-masing RW berjumlah Rp 2 juta, sehingga total dana yang dianggarkan Pemkot Yogyakarta dari APBD 2009 adalah Rp 1.691.300.000 untuk dana administrasi RT/RW dan Rp 1.228.000.000 untuk dana stimulan RW. Untuk urusan pengawasan, pihaknya meminta adanya laporan pertanggungjawaban di akhir tahun dari masing-masing pengurus.

Selain itu, Pemkot Yogyakarta juga mengalokasikan dana sebesar Rp 3.699.000.000 untuk Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) yang besarnya bervariasi untuk 45 kelurahan yang ada, yaitu antara Rp 58 juta hingga Rp 126 juta per tahunnya yang ditujukan untuk mendukung atau melaksanakan pembangunan fisik dan non fisik di wilayah tersebut.

(W-8)n

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005